



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1529/SEK/KU.01/10/2019

24 Oktober 2019

Lampiran : 1 (satu) set

Sifat : Segera

Hal : Undangan Pembinaan dan Konsultasi
Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan
Tahun Anggaran 2020

Yth.
(Daftar Terlampir)

Di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya belanja modal pembangunan gedung kantor TA 2020 pada empat (4) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia agar berjalan dengan efektif dan efisien, dengan ini kami akan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d. Jumat

Tanggal : 30 Oktober s.d 1 November 2019

Tempat : Hotel Mercure Convention Center Ancol
Lantai 1 Ruang Krakatau 1-2 Jalan Baycity, Pantai Indah Ancol
Pademangan Jakarta Utara

Acara : Pembinaan dan Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Kantor Pengadilan Tahun Anggaran 2020

Agar kegiatan tersebut berjalan dengan optimal, peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Registrasi peserta dimulai pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 11.00 WIB (disiapkan makan siang)
2. Para peserta memakai pakaian batik lengan panjang
3. Para peserta diharapkan membawa laptop
4. Biaya tiket pesawat PP ekonomi (dari Satker asal ke Jakarta PP), transportasi, penginapan dan uang harian peserta dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2019
5. Nama peserta dan Jabatan beserta tiket pesawat PP agar dikirim via email ke hilma.bua@gmail.com dan renogbimon@gmail.com paling lambat hari senin tanggal 28 Oktober 2019
6. Boarding pass pesawat berangkat, tiket pesawat PP, dan surat tugas diserahkan pada saat registrasi
7. Boarding pass pesawat pulang segera dikirim ke alamat kantor Mahkamah Agung c.q. Biro Keuangan a.n. Hilma Bahari.

Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Kosasih (081310233324) dan sdr. Hilma Bahari (08122103393)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
6. Kepala Badan Pengawasan;

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1529/SEK/KU.01/10/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019

FORMULIR KONFIRMASI KEHADIRAN

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan hadir pada acara Pembinaan dan Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 30 Oktober s.d. 01 November 2019. Formulir ini sekaligus sebagai bentuk persetujuan atas hal-hal berikut :

1. Biaya tiket pesawat dari pengadilan asal ke Jakarta PP dan biaya transportasi dari Bandara Jakarta ke tempat acara dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi.
2. Biaya penginapan di Jakarta tanggal 30 Oktober s.d. 01 November 2019 dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi.
3. Biaya transportasi dari pengadilan sal ke Bandara setempat PP, uang saku dan uang makan dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi.

Demikian formulir ini disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2019

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Lampiran Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1529/SEK/KU.01/10/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG

1	KETUA PENGADILAN NEGERI BELOPA	PN BELOPA
2	KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PN CIKARANG
3	KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	PN GEDONG TATAAN
4	KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA	PN KOBA
5	KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	PN KUALA KURUN
6	KETUA PENGADILAN NEGERI LASUSUA	PN LASUSUA
7	KETUA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	PN MELONGUANE
8	KETUA PENGADILAN NEGERI MUKO MUKO	PN MUKO MUKO
9	KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	PN NANGA BULIK
10	KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	PN PANGKALAN BALAI
11	KETUA PENGADILAN NEGERI PENAJAM	PN PENAJAM
12	KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	PN PULANG PISANG
13	KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	PN PULAU PUNJUNG
14	KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	PN SEI RAMPAH
15	KETUA PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	PN SUKA MAKMUE
16	KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	PN TELUK KUANTAN
17	KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA	PA AMPANA
18	KETUA PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	PA KEPAHIANG
19	KETUA PENGADILAN AGAMA LASUSUA	PA LASUSUA
20	KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK	PA LOLAK
21	KETUA PENGADILAN AGAMA MALILI	PA MALILI
22	KETUA PENGADILAN AGAMA MESUJI	PA MESUJI
23	KETUA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	PA PULAU PUNJUNG
24	KETUA PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	PA SEI RAMPAH
25	KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE	MS SUKA MAKMUE



Lampiran Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1529/SEK/KU.01/10/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG

1	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AMBON	PT AMBON
2	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	PT BANDA ACEH
3	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PT BANDUNG
4	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	PT BANGKA BELITUNG
5	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PT BANJARMASIN
6	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANTEN	PT BANTEN
7	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PT BENGKULU
8	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PT DENPASAR
9	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PT GORONTALO
10	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PT JAKARTA
11	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI JAMBI	PT JAMBI
12	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PT JAYAPURA
13	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KENDARI	PT KENDARI
14	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG	PT KUPANG
15	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PT MALUKU UTARA
16	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI MANADO	PT MANADO
17	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI MATARAM	PT MATARAM
18	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI MEDAN	PT MEDAN
19	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PADANG	PT PADANG
20	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PT PALANGKARAYA
21	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PT PALEMBANG
22	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALU	PT PALU
23	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	PT PEKANBARU
24	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PT PONTIANAK
25	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	PT SAMARINDA
26	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI SEMARANG	PT SEMARANG
27	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PT SURABAYA
28	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PT TANJUNG KARANG
29	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	PT UJUNG PANDANG
30	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PT YOGYAKARTA
31	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PTA AMBON
32	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	PTA BANDAR LAMPUNG
33	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PTA BANDUNG

34	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	PTA BANGKA BELITUNG
35	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	PTA BANJARMASIN
36	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	PTA BANTEN
37	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PTA BENGKULU
38	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PTA GORONTALO
39	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	PTA JAKARTA
40	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PTA JAMBI
41	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PTA JAYAPURA
42	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	PTA KENDARI
43	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	PTA KUPANG
44	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	PTA MAKASSAR
45	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE	PTA MALUKU UTARA
46	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	PTA MANADO
47	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PTA MATARAM
48	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	PTA MEDAN
49	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PTA PADANG
50	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	PTA PALANGKARAYA
51	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PTA PALEMBANG
52	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PTA PALU
53	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	PTA PEKANBARU
54	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PTA PONTIANAK
55	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PTA SAMARINDA
56	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PTA SEMARANG
57	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	PTA SURABAYA
58	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	PTA YOGYAKARTA
59	SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH	MS BANDA ACEH
60	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	PT TUN JAKARTA
61	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	PT TUN MEDAN
62	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	PT TUN SURABAYA
63	SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	PT TUN UJUNG PANDANG
64	SEKRETARIS PENGADILAN MILITER UTAMA	DILMILTAMA
65	SEKRETARIS PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	DILMILTI JAKARTA
66	SEKRETARIS PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	DILMILTI MEDAN
67	SEKRETARIS PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	DILMILTI SURABAYA
68	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	PN AMLAPURA
69	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	PN BANGKINANG
70	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BELOPA	PN BELOPA
71	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PN CIKARANG
72	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI DONGGALA	PN DONGGALA

73	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	PN GEDONG TATAAN
74	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	PN INDRAMAYU
75	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	PN KARANGANYAR
76	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KOBA	PN KOBA
77	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	PN KUALA KURUN
78	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI LABUHA	PN LABUHA
79	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI LASUSUA	PN LASUSUA
80	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	PN MARABAHAN
81	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MAROS	PN MAROS
82	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	PN MELONGUANE
83	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUKO MUKO	PN MUKO MUKO
84	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	PN NANGA BULIK
85	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PADANG	PN PADANG
86	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PALU	PN PALU
87	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	PN PANGKALAN BALAI
88	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	PN PARIAMAN
89	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PARIGI	PN PARIGI
90	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PENAJAM	PN PENAJAM
91	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	PN PULANG PISANG
92	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	PN PULAU PUNJUNG
93	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	PN PURBALINGGA
94	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	PN SEI RAMPAH
95	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIGLI	PN SIGLI
96	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SLAWI	PN SLAWI
97	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	PN SUKA MAKMUE
98	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SUMBER	PN SUMBER
99	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PN SUNNGUMINASA
100	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAIS	PN TAIS
101	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA TAKALAR	PN TAKALAR
102	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	PN TASIKMALAYA
103	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TEBO	PN TEBO
104	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	PN TELUK KUANTAN
105	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	PN TILAMUTA
106	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	PN WONOSOBO
107	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA AMPANA	PA AMPANA
108	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BAJAWA	PA BAJAWA
109	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	PA JAYAPURA
110	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	PA KARANG ASEM

111	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KEPAPIANG	PA KEPAPIANG
112	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA LASUSUA	PA LASUSUA
113	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA LOLAK	PA LOLAK
114	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MALILI	PA MALILI
115	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MESUJI	PA MESUJI
116	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	PA PULAU PUNJUNG
117	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SAWAH LUNTO	PA SAWAH LUNTO
118	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	PA SEI RAMPAH
119	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SEKAYU	PA SEKAYU
120	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SENTANI	PA SENTANI
121	SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE	MS SUKA MAKMUE
122	SEKRETARIS PENGADILAN MILITER I - 01 BANDA ACEH	DILMIL ACEH
123	SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	PTUN JAKARTA
124	SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	PTUN PALU



Lampiran Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1529/SEK/KU.01/10/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG

1 PPK PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PT MALUKU UTARA
2 PPK PENGADILAN TINGGI PALU	PT PALU
3 PPK PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PT SURABAYA
4 PPK PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PTA JAYAPURA
5 PPK PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE	PTA MALUKU UTARA
6 PPK PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	PTA PALEMBANG
7 PPK PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PTA PALU
8 PPK PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	PN AMLAPURA
9 PPK PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	PN BANGKINANG
10 PPK PENGADILAN NEGERI BELOPA	PN BELOPA
11 PPK PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PN CIKARANG
12 PPK PENGADILAN NEGERI DONGGALA	PN DONGGALA
13 PPK PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	PN GEDONG TATAAN
14 PPK PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	PN INDRAMAYU
15 PPK PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	PN KARANGANYAR
16 PPK PENGADILAN NEGERI KOBA	PN KOBA
17 PPK PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	PN KUALA KURUN
18 PPK PENGADILAN NEGERI LABUHA	PN LABUHA
19 PPK PENGADILAN NEGERI LASUSUA	PN LASUSUA
20 PPK PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	PN MARABAHAN
21 PPK PENGADILAN NEGERI MAROS	PN MAROS
22 PPK PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	PN MELONGUANE
23 PPK PENGADILAN NEGERI MUKO MUKO	PN MUKO MUKO
24 PPK PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	PN NANGA BULIK
25 PPK PENGADILAN NEGERI PADANG	PN PADANG
26 PPK PENGADILAN NEGERI PALU	PN PALU
27 PPK PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	PN PANGKALAN BALAI
28 PPK PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	PN PARIAMAN
29 PPK PENGADILAN NEGERI PARIGI	PN PARIGI
30 PPK PENGADILAN NEGERI PENAJAM	PN PENAJAM
31 PPK PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	PN PULANG PISANG
32 PPK PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	PN PULAU PUNJUNG
33 PPK PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	PN PURBALINGGA
34 PPK PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	PN SEI RAMPAH
35 PPK PENGADILAN NEGERI SIGLI	PN SIGLI
36 PPK PENGADILAN NEGERI SLAWI	PN SLAWI
37 PPK PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	PN SUKA MAKMUE
38 PPK PENGADILAN NEGERI SUMBER	PN SUMBER
39 PPK PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PN SUNNGUMINASA
40 PPK PENGADILAN NEGERI TAIS	PN TAIS

41	PPK PENGADILAN AGAMA TAKALAR	PN TAKALAR
42	PPK PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	PN TASIKMALAYA
43	PPK PENGADILAN NEGERI TEBO	PN TEBO
44	PPK PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	PN TELUK KUANTAN
45	PPK PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	PN TILAMUTA
46	PPK PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	PN WONOSOBO
47	PPK PENGADILAN AGAMA AMPANA	PA AMPANA
48	PPK PENGADILAN AGAMA BAJAWA	PA BAJAWA
49	PPK PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	PA JAYAPURA
50	PPK PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	PA KARANG ASEM
51	PPK PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	PA KEPAHIANG
52	PPK PENGADILAN AGAMA LASUSUA	PA LASUSUA
53	PPK PENGADILAN AGAMA LOLAK	PA LOLAK
54	PPK PENGADILAN AGAMA MALILI	PA MALILI
55	PPK PENGADILAN AGAMA MESUJI	PA MESUJI
56	PPK PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	PA PULAU PUNJUNG
57	PPK PENGADILAN AGAMA SAWAH LUNTO	PA SAWAH LUNTO
58	PPK PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	PA SEI RAMPAH
59	PPK PENGADILAN AGAMA SEKAYU	PA SEKAYU
60	PPK PENGADILAN AGAMA SENTANI	PA SENTANI
61	PPK MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	MS SUKA MAKMUE
62	PPK PENGADILAN MILITER I - 01ACEH	DILMIL ACEH
63	PPK PENGADILAN TATA USAHA NEGERA JAKARTA	PTUN JAKARTA
64	PPK PENGADILAN TATA USAHA NEGERA PALU	PTUN PALU



Sekretaris Mahkamah Agung

A.S. Pudjoharsoyo

JADWAL ACARA
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2020
JAKARTA, 30 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2019

HARI/TANGGAL	PUKUL	ACARA	KETERANGAN (PJ dan Narasumber)
Rabu, 30 Okt 2019	11.00 - 12.00	Registrasi	Panitia
	12.00 – 14.00	Makan siang	Panitia
	14.00 - 15.00	Check in	Panitia
	15.00 - 17.30	Pembukaan dan Pengarahan	
		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne MA	
		Penyampaian Laporan Kegiatan	Kepala Biro Keuangan
		Sambutan/Pengarahan sekaligus membuka acara	Sekretaris MA
		Do'a	
	17.30 – 19.30	Ishoma	Panitia
	19.30 - 20.30	Kebijakan Alokasi Prioritas – Pembangunan Gedung Kantor	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi & Kepala Biro Perlengkapan
	20.30 – 20.45	Coffee Break	Panitia
	20.45 – 22.00	Lanjutan Kebijakan Alokasi – Pembangunan Gedung Kantor	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi & Kepala Biro Perlengkapan
Kamis, 31 Okt 2019	06.00 - 08.00	Breakfast	
	08.00 - 10.00	Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	LKPP
	10.00 - 10.15	Coffee Break	Panitia
	10.15 – 12.00	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	LKPP

HARI/TANGGAL	PUKUL	ACARA	KETERANGAN (PJ dan Narasumber)
	12.00 – 13.30	Ishoma	
	13.30 - 15.00	Kebijakan LPSE	LKPP
	15.00 - 15.15	Coffee Break	
	15.15 - 17.15	Pedoman dan Kebijakan Pembangunan Gedung Kantor	PUPR
	17.15 - 19.30	Ishoma	
Jumat, 1 Nop 2019	19.30 - 22.00	Pengelolaan dan Pencatatan BMN	DJKN
	06.00 - 08.00	Breakfast	Panitia
	08.00 - 09.30	Proses Pertanggungjawaban Keuangan	DJPb dan Bawas
	09.30 -09.45	Coffee Break	Peserta
	09.45 - 11.00	Pleno Kepala Biro Mendengar dan Diskusi	Para Kepala Biro di BUA
	11.00 - selesai	Check Out	Panitia



Djakarta, 24 Oktober 2019

Kepala Biro Keuangan

Sahwan